

TESIS

**KETERPILIHAN ERNA RASYID TAUFAN PAWE SEBAGAI KETUA
DPD II PARTAI GOLKAR KOTA PAREPARE**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Magister Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik*

Oleh :

AHMAD KAMAL DAHLAN

E052212006

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TESIS

**KETERPILIHAN ERNA RASYID TAUFAN PAWE SEBAGAI KETUA
DPD II PARTAI GOLKAR KOTA PAREPARE**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar magister ilmu
politik pada Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

AHMAD KAMAL DAHLAN

E052212006

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KETERPILIHAN ERNA RASYID TAUFAN PAWE SEBAGAI
KETUA DPD II PARTAI GOLKAR KOTA PAREPARE**

Disusun dan diajukan oleh
AHMAD KAMAL DAHLAN
E052212006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **04 September 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



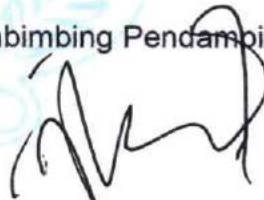
Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP. 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Politik,



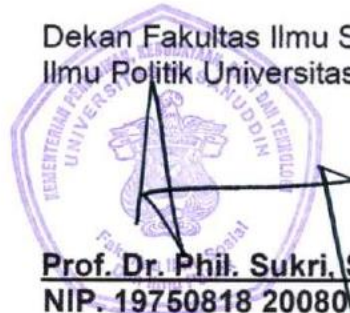
Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.
NIP. 19710705 199803 2002.

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sakinah Nadir, M.Si
NIP. 19791218 20081 2 2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP. 19750818 200801 1008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Kamal Dahlan
NIM : E052212006
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Jenjang : Strata-2 (S2)

Menyatakan bahwa tesis dengan judul **Keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare**. Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 25 September 2023
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Kamal Dahlan

ABSTARK

Ahmad Kamal Dahlan. NIM E052212006. Keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Di bawah bimbingan Ariana Yunus dan Sakinah Nadir.

Studi ini tentang keterpilihan Erna Taufan Pawe pada pemilihan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana ada indikasi bahwa keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe disebabkan oleh faktor hubungan antara ketua DPW partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Taufan Pawe yang juga merupakan suami dari Erna Rasyid Taufan Pawe. Pada kasus keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare tidak bisa digolongkan pada fenomena politik kekerabatan atau politik dinasti. Sebab posisi Erna Rasyid Taufan Pawe yang terpilih sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Lebih dipengaruhi oleh keterlibatan Taufan Pawe selaku Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak ketiga atau yang ada dibelakang keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di internal Partai Golkar kota Parepare.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis bentuk *proxy* politik dalam keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Selain itu penelitian ini juga menganalisis proses keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare pada musyawarah daerah DPD II Partai Golkar kota Parepare. Penulis melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan fokus penelitian ini serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti data-data dari instansi terkait. Adapun pendekatan dan konsep yang digunakan ialah teori representasi simbolik dengan menkonsepsikan dalam konsep *proxy*.

Dalam hasil Penelitian ini menjelaskan ada dua faktor besar dalam keterpilihan Erna Rasyid sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Parepare. *Pertama*, dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah daerah Partai Golkar kota Parepare merupakan bagian dari hal yang biasa dalam proses demokrasi di internal partai politik. Namun, dalam partai Golka kota Parepare dinamika tersebut secara jelas memperlihatkan arah yang jelas bahwa hasil musyawarah sudah di tentukan hasilnya sebelumnya. *Kedua*, Dari hasil penelitian menunjukkan bentuk *proxy* pada pemilihan ketua partai Golkar kota Parepare. Dalam penelitian ini menunjukkan bentuk *proxy* politik bermodel eksploitatif dapat terlihat dari pengaruh mutlak Taufan Pawe dalam pemilihan dan ketergantungan Erna Rasyid pada loyalis Taufan Pawe.

Kata Kunci : *Proxy*, Representasi Simbolik, Musyawarah Daerah, Partai Golkar.

ABSTRACT

Ahmad Kamal Dahlan. NIM E052212006. The Election of Erna Rasyid Taufan Pawe as Chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city. Under the guidance of Mrs. Ariana Yunus and Sakinah Nadir.

This study is about the election of Erna Taufan Pawe in the election of the chairman of DPD Golkar Party Parepare. Where there are indications that Erna Rasyid Taufan Pawe's election was caused by the relationship factor between the chairman of the South Sulawesi Golkar party DPW, Taufan Pawe, who is also the husband of Erna Rasyid Taufan Pawe. In the case of Erna Rasyid Taufan Pawe's election as chairman of the DPD II Golkar Party of Parepare city, it cannot be classified as a phenomenon of kinship politics or dynastic politics. Because the position of Erna Rasyid Taufan Pawe who was elected as chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city. More influenced by the involvement of Taufan Pawe as Chairman of DPD I Golkar Party of South Sulawesi Province as a third party or behind the election of Erna Rasyid Taufan Pawe to maintain his influence and power in the internal Golkar Party of Parepare city.

This research aims to analyze the form of political proxy in the election of Erna Rasyid Taufan Pawe as chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city. In addition, this research also analyzes the process of Erna Rasyid Taufan Pawe's election as chairman of DPD II Golkar Party of Parepare city at the regional deliberation of DPD II Golkar Party of Parepare city. The author conducted case study research on the basis of qualitative research. Data collection is done by interviewing key informants who are considered to be able to explain the focus of this research and complement it with several written references such as data from related agencies. The approach and concept used is symbolic representation theory by focusing on the concept of proxy.

The results of this study explain that there are two major factors in the election of Erna Rasyid as Chairman of DPD II Golkar Parepare City. First, the dynamics that occurred in the implementation of the regional deliberation of the Golkar Party of Parepare city is part of the usual things in the democratic process in the internal political party. However, in the Golka party of Parepare city, the dynamics clearly show a clear direction that the results of the deliberation have been predetermined. Second, the results showed the form of proxy in the election of the chairman of the Golkar party in Parepare city. This research shows that the exploitative model of political proxy can be seen from Taufan Pawe's absolute influence in the election and Erna Rasyid's dependence on Taufan Pawe's loyalists.

Keywords: Proxy, Symbolic Representation, Regional Deliberation, Golkar Party,

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil a'alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini yang kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ujian yang penulis hadapi selama menyusun skripsi ini hingga pada tahap ujian akhir. Namun berkat adanya bantuan dukungan, dorongan, do'a, serta semangat dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan penulis. Melalui kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Orang tua ayahanda tercinta Dahlan Hafid dan ibunda tersayang Andi Hasniati yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada

penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan **Ibu Dr. Ariana, S.I.P., M.Si** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Unhas,
3. **Ibu Ibu Dr. Ariana, S.I.P., M.Si** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
4. **Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.I.P., M.Si** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Umni Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si** Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan

selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

6. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Seluruh mahasiswa seangkatan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya rekan sejurusan Delegasi yang selalu membuat hari hari penulis lebih berwarna.
8. Ari, Ady, Ifan dan Rahmat selaku personil Kemang yang selalu menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Informan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Juli 2023

Penulis,

Ahmad Kamal Dahlan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTARK	v
<i>ABSTRACK</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Reprntasi Simbolik.....	10
2.2 Konsep <i>Proxy</i> Politik.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
2.4 Skema Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian	23
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian	24
3.3 Sumber Data dan Informan Penelitian.....	25
3.3.1 Data Primer	25
3.3.2 Data Sekunder.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	34
4.1 Kota Parepare.....	34
4.2 Gambaran Partai Golkar	38
4.2.1 Tujuan dan Fungsi Partai Golkar	38
4.2.2 Visi dan Misi Partai Golkar.....	40
4.2.3 Platfrom Partai Golkar	41
4.3 Partai Golkar DPD II Kota Parepare	44
4.4 Profil Hj. Erna Rasyid, SE	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
5.1 Dinamika Musyawarah Daerah DPD II Partai Gokar kota Parepare..	48
5.2 Bentuk Proxy Politik dalam Pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare.....	63
5.2.1 Bentuk <i>Proxy</i> Politik Model Eksploitatif.....	64

5.2.1.1 Pengaruh Mutlak Taufan Pawe dalam Keterpilihan Erna Rasyid.....	66
5.2.1.2 Ketergantungan Erna Rasyid pada Loyalis Taufan Pawe	73
5.3 Implikasi Teoritik	76
BAB VI PENUTUP	81
6.1. Kesimpulan.....	81
6.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini tentang keterpilihan Erna Taufan Pawe pada pemilihan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana ada indikasi bahwa keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe disebabkan oleh faktor hubungan antara ketua DPW partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Taufan Pawe yang juga merupakan suami dari Erna Rasyid Taufan Pawe. Fenomena ini dalam literatur politik khususnya dalam kajian politik di Indonesia dipandang sebagai fenomena politik kekerabatan atau politik dinasti. Sedangkan peneliti menganggap bahwa fenomena keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare adalah lebih cenderung mengarah ke fenomena *proxy* politik.

Kajian tentang politik *proxy* masih sangat kurang, khususnya di Indonesia. Sebab kebanyakan peneliti mengkaji distribusi kekuasaan yang melibatkan keluarga pada tataran politik kekerabatan atau politik dinasti. Dimana untuk mengkaji suatu fenomena sebagai bagian dari politik kekerabatan ataupun politik dinasti terdapat beberapa indikator seperti kekuasaan di turunkan kepada keluarga minimal dua periode kekuasaan dan terdiri dari minimal dua generasi disebut dengan politik dinasti sedangkan politik politik kekerabatan merujuk pada empat kerabat yang

sama pada jabatan resmi atau bahkan terdiri dari empat generasi.¹ Pada kasus keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare tidak bisa digolongkan pada fenomena politik kekerabatan atau politik dinasti. Sebab posisi Erna Rasyid Taufan Pawe yang terpilih sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Lebih dipengaruhi oleh keterlibatan Taufan Pawe selaku Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak ketiga atau yang ada dibelakang keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di internal Partai Golkar kota Parepare.

Proxy politik merupakan peran terselubung dimana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh.² Dengan kata lain, *Proxy* politik artinya perang tidak tampak menggunakan cara cara halus untuk mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Hal inilah yang menjadi penyebab fenomena keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe pada pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana Taufan pawe menggunakan istrinya untuk menduduki jabatan Ketua DPD Partai Golkar Parepare. Posisi Erna Rasyid Taufan Pawe dijadikan *Proxy* atau simbol representasi dari kekuatan politik Taufan Pawe di internal Partai Golkar kota Parepare.

¹ Muhammad Syamsul Hidayat, Sri Budi Eko Wardani. Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang. *TheJournalish: Social and Government*. *TheJournalish: Social and Government*. Volume 3 nomor 2 tahun 2022.

² Definisi ini simpulkan dari artikel ilmiah yang ditulis Kristian Stokke dan Elin Solbei. *Symbolic Representations as Political Practice*. Palgrave Studies in Governance, Security, and Development book series (GSD).

Proses pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare diwarnai sebuah dinamika dalam pelaksanaannya karena pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) satu satu-nya penantang Erna Rasyid Taufan Pawe yaitu Taqjuddin Djabbar, S.Sos memutuskan untuk mundur sebagai calon ketua ditengah proses Musda Partai Golkar kota Parepare. Erna Rasyid Taufan Pawe yang hanya menjadi kader biasa didalam organisasi Partai Golkar Parepare dan tidak memiliki rekam jejak atau jabatan politik baik di daerah maupun provinsi baik dalam partai Golkar itu sendiri maupun di pemerintahan. Sementara pada pemilihan tersebut terdapat banyak kader yang dianggap mampu dan memiliki pengalaman yang lebih baik untuk menduduki posisi sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare.

Dalam tubuh Partai Golkar kota Parepare masih terdapat kader yang dianggap lebih layak untuk menduduki posisi tersebut seperti Taqjuddin Djabbar. S.Sos yang merupakan kader lama dan mantan calon walikota Parepare pada Pilkada 2013 yang juga mantan ketua PMI kota Parepare yang sekarang menjabat sebagai ketua IKA Unhas wilayah Parepare, ketua DPRD Kota Parepare periode 2019-2024 yang kala itu menjabat, Alhm. Andi Nurhatina Tipu yang sebelum masa purna-nya sebagai PNS menjabat sebagai camat Bacukiki, mantan ketua DPRD Kota Parepare periode 2014-2019 yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Parepare periode 2019-2024.

Posisi Taufan Pawe sebagai seorang Walikota Parepare dan ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang memiliki pengaruh besar dalam Partai Golkar. Dianggap sebagai faktor penyebab sehingga Erna Rasyid Taufan Pawe dapat terpilih sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare, hal ini diperkuat dengan mundurnya Taqjuddin Djabbar, S.Sos sebagai calon ketua yang banyak kalangan memprediksi-nya akan terpilih. Banyak yang beranggapan bahwa mundurnya Taqjuddin Djabbar, S.Sos dari kontestasi pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare juga disebabkan karena adanya lobbi politik yang terjadi antara pihak Erna Rasyid Taufan Pawe.

Erna Rasyid Taufan Pawe juga memiliki modal lain yang menunjang elektabilitasnya dalam memperoleh jabatan sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare, Erna Rasyid Taufan Pawe juga dikenal banyak melakukan aktivitas dakwah kepada masyarakat Parepare. Selain modal-nya sebagai pendakwah, Erna Rasyid Taufan Pawe juga memiliki modal keluarga seperti yang telah dijelaskan diatas Erna Rasyid Taufan Pawe merupakan istri dari walikota Parepare sekaligus ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Dalam konteks ini *proxy* politik berbeda dengan politik kekerabatan atau dinasti politik. Politik kekerabatan hadir seiring dengan liberalisasi politik dan praktek politik desentralisasi. Politik kekerabatan merupakan konsep lama dalam kajian ilmu politik. Secara sederhana Politik kekerabatan dimaknai mirip dengan dengan perilaku nepotisme. Mengapa

demikian? Karena politik kekerabatan melakukan praktik pendistribusian kekuasaan diantara para anggota keluarga sedarah.³

Studi tentang politik kekerabatan sudah banyak dilakukan, baik di berbagai negara di dunia maupun Indonesia. Misalnya, studi Dal Bó et al. (2009) dan Querubin (2016) serta Rossi (2016) yang membahas tentang pengaruh lamanya masa jabatan dari seorang politisi terhadap kecenderungan munculnya dinasti politik. Temuan penting dari studi ini adalah terkait lamanya masa jabatan seorang politisi yang dapat memberikan keuntungan bagi kerabatnya yang bertarung dalam kontestasi elektoral, karena nama keluarga yang telah dikenal atau jejaring politik yang telah kuat dan luas.⁴ Politik kekerabatan pada prakteknya dapat ditemui di berbagai Negara di dunia, termasuk Negara-negara dengan sistem demokrasi yang mapan. Misalnya Di Amerika Serikat, kita kenal dinasti Kennedy dan George Bush.

Sebelum itu, ada juga John Adams (presiden kedua AS) yang putranya, John Quincy Adams, menjadi presiden keenam AS. Ada pula Franklin Delano Roosevelt (presiden ke-32 AS) yang adalah sepupu Theodore Roosevelt (presiden ke-26 AS). Roosevelt sendiri dikatakan memiliki hubungan kekerabatan dengan 11 presiden: 5 berdasarkan

³ Dikutip dalam tulisan Muhtar Haboddin berjudul Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia. 2015. Malang, UB Pres

⁴ Mudiwati Rahmatunnisa. (2021). Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Jurnal academia Praja Volume 4. No. 2. Hal. 299

hubungan darah dan 6 lain karena pernikahan.⁵ Kemudian keluarga Nehru dan Gandhi di India, keluarga Bhutto di Pakistan, Trudeau di Kanada dan Allende di Chile merupakan beberapa contoh dinasti politik. Filipina juga tidak kalah spektakuler dalam praktek politik kekerabatan. Lebih dari setengah anggota legislatif dan gubernur yang terpilih, memiliki kerabat yang menduduki posisi strategis di berbagai lembaga pemerintah. Bahkan, 40% dari 79 provinsi yang ada, gubernur dan anggota legislatifnya merupakan kerabat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nico Harjanto (2011) yang berjudul Politik kekerabatan dan institusioanlisasi Partai Politik di Indonesia menjelaskan.⁶ Politik kekerabatan atau politik dinasti saat ini khususnya di Indonesia semakin menguat. Terlihat dari banyaknya elite partai yang memberikan kekuasaan dalam partai politik kepada keluarganya untuk melanjutkan pengaruh atau kepemimpinannya dalam sebuah partai. Istilah politik keluarga dan politik kekerabatan adalah sama yaitu merujuk pada aktor politik yang memiliki ikatan pertalian atau hubungan kerabat dengan mantan pejabat politik sebelumnya dan rentang waktu minimal dua generasi. Sedangkan politik dinasti menurut Hess (1966) merupakan keluarga yang memiliki setidaknya empat anggota, dengan nama yang sama, terpilih sebagai pejabat resmi. Adapun menurut Yasushi

⁵ Dinna Wisnu. (2013), Jaringan Politik Kekerabatan, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/29/1047509/Jaringan.Politik.Kekerabatan?page=all>. Hal. 1

⁶ Diikutip dalam tulisan Nico Harjanto berjudul Politik kekerabatan dan institusioanlisasi Partai Politik di Indonesia. 2011. Analisis CSIS. Vol. 40 No. 2. Hal. 152.

Asako (2010), politik dinasti terjadi apabila satu anggota keluarga menduduki jabatan politik yang sebelumnya dijabat oleh kerabatnya.

Pembatasan definisi berdasarkan pengertian di atas menunjukkan perbedaan dimensi waktu dan jumlah. Keluarga dari pejabat politik sebelumnya dalam rentang waktu minimal dua periode kekuasaan dan terdiri dari minimal dua generasi disebut dengan politik kekerabatan sedangkan politik dinasti merujuk pada empat kerabat yang sama pada jabatan resmi atau bahkan terdiri dari empat generasi (Dal Bo, Dal Bo, and Snyder 2007).⁷ Berbeda dengan kajian dan penelitian tersebut menyangkut politik kekerabatan dan politik dinasti.

Fenomena ini memperkuat fakta bahwa sistem kekuasaan diturunkan kepada keluarga atau kerabat tidak bisa di artikan hanya sekedar praktik politik kekerabatan ataupun dinasti politik semata. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe Ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, menjadi :

1. Bagaimana proses keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe dalam Musda DPD II Golkar kota Parepare?

⁷ Ibid Mudiwati Hal. 306.

2. Bagaimana bentuk *proxy* politik dalam keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk :

1. Menganalisis proses keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare pada musyawarah daerah DPD II Partai Golkar kota Parepare.
2. Menganalisis bentuk *proxy* politik dalam keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Peneliti membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis.

A. Manfaat Akademik

1. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat memahami bagaimana proses yang terjadi dalam pemilihan ketua partai politik.

2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat paska sarjana (S2) untuk memperoleh gelar magister pada Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan aspek-aspek teoritis yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Konsep-konsep yang dipaparkan dalam bab ini berkaitan dengan pokok bahasan dan hasil penelitian, yang mana juga diterapkan guna membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

2.1 Teori Reprerentasi Simbolik

Representasi simbolik menurut Pitkin ialah agen yang secara simbolis 'berdiri untuk' prinsipal, yaitu representasi konstituen melalui perwakilan yang menyorankan atau membangkitkan perasaan, Definisi Pitkin adalah bagian dari kerangka empat dimensi representasi politik, yaitu formalistik (aturan formal representasi), deskriptif ('kedudukan' fisik), substantif ('bertindak untuk') dan simbolik. Pitkin mendefinisikan representasi simbolik sebagai dimensi itu sendiri, melengkapi tetapi tidak berasal dari representasi deskriptif. Dia melakukannya dengan menguraikan perbedaan konseptual dari berbagai dimensi representasi politik melalui hubungan agen-prinsipal dan identifikasi peran agen berdiri (secara fisik atau simbolis) dan bertindak (secara substansial) untuk prinsipal atau konstituen.⁸

⁸ Emanuela Lombardo. Signifikansi Representasi Simbolik untuk Isu Gender dalam Politik. NORA - Jurnal Penelitian Feminis dan Gender Nordik. Hal.4

Perspektif representasi simbolik ini penulis kemudian melihat adanya hubungan antara Taufan Pawe dan erna Rasyid Taufan Pawe dalam pemilihan ketua DPD Partai Golkar Parepare. Dimana Rasyid Taufan Pawe di gunakan sebagai representative dari symbol kekuasaan yang dimiliki oleh taufan pawe di partai Golkar, karena Taufan Pawe sebagai ketua DPD I partai Golkar Sulawesi selatan sekaligus mantan ketua DPD II Partai Golkar Parepare masih berusaha mempertahankan kekuasaanya di Partai Golkar Parepare.

Representasi simbolik secara khusus dilihat oleh Pitkin sebagai proses di mana simbol, melalui asosiasi atau konvensi, merepresentasikan sesuatu yang lain di luar dirinya, seperti sebuah bendera yang merepresentasikan sebuah negara nilai, dan keyakinan. Sambil menciptakan ruang untuk mendefinisikan representasi simbolik sebagai dimensi yang berdiri sendiri, Pitkin terutama mengaitkannya dengan rezim otoriter dan merendahnya karena dua alasan dugaan kurangnya aktivitas dalam representasi simbolik dan komponen irasionalnya.

Dibandingkan dengan representasi deskriptif dan substantif, representasi simbolik belum banyak mendapat perhatian dalam literatur. Sebagian besar karya ilmiah membahas simbolisme politik, misalnya dalam kaitannya dengan penggunaan simbol oleh rezim otoriter atau demokrasi dalam proses konstruksi identitas politik sehari-hari, perolehan legitimasi, atau branding bangsa. Simbol politik dapat mengambil bentuk

yang berbeda-beda, baik itu visual seperti bendera atau patung negara, akustik seperti lagu kebangsaan, atau diskursif, misalnya teks konstitusi . Sementara penelitian telah menganalisis cara simbol seperti bendera nasional, dengan mewakili prinsipal, mewujudkan bangsa atau negara.⁹

Saward berpendapat bahwa representasi politik adalah tentang membuat klaim yang membangun atau menggambarkan gagasan tentang konstituensi. Fokus pada komponen yang dikonstruksikan, yang diteorikan Saward untuk representasi politik secara umum, cenderung memberikan representasi simbolik. Simbol adalah sebuah konstruksi bukan hanya karena diciptakan melalui pilihan perwakilan visual atau akustik tertentu (bendera, patung, lagu kebangsaan) dan pemilihan warna dan gambar tertentu, tetapi juga karena maknanya dibentuk, dan diasosiasikan. untuk konstituen tertentu yang karena itu disajikan dalam cara tertentu. ¹⁰

Saward pada karyanya memperhatikan fakta bahwa a) representasi politik adalah sebuah konstruksi; dan b) representasi politik dapat dikonseptualisasikan melalui definisi yang melingkupi para pembuat representasi dan gagasan tentang suatu konstituen sebagai bukan konstituen itu sendiri. Namun, konseptualisasi umumnya tentang representasi politik tidak memungkinkan untuk menggambarkan perbedaan analitis di antara dimensi-dimensi tersebut. Seperti yang

⁹ Pernyataan Saward yang di kutip dalam tulisan Emanuela Lombardo. Signifikansi Representasi Simbolik untuk Isu Gender dalam Politik. NORA - Jurnal Penelitian Feminis dan Gender Nordik Hal. 4

¹⁰ Ibid.

dinyatakan Kertzer 'sebuah bendera bukan sekadar kain yang dihias, tetapi Definisi Pitkin adalah bagian dari kerangka empat dimensi representasi politik, yaitu formalistik (aturan formal representasi), deskriptif ("kedudukan" fisik), substantif ("bertindak untuk") dan simbolik.¹¹

Simbol politik dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda, baik itu visual seperti bendera atau patung negara, akustik seperti lagu kebangsaan, atau diskursif, misalnya teks konstitusi Sementara penelitian telah menganalisis cara simbol seperti bendera nasional, dengan mewakili prinsipal, mewujudkan bangsa atau negara studi gender dan politik telah menempatkan fokus pada bagaimana simbol politik mencerminkan dan membentuk hubungan kekuasaan, misalnya. menghadirkan laki-laki dalam posisi yang lebih berwibawa dan diakui secara sosial daripada perempuan berpendapat bahwa simbol mencapai efek memprovokasi tanggapan tertentu terhadap prinsip yang ditimbulkan melalui pelatihan kebiasaan dan praktik sosial yang membuat orang mengasosiasikan simbol seperti bendera nasional dengan perasaan keterikatan pada bangsa, yang menjelaskan mengapa menginjak atau membakar bendera nasional dapat dikutuk secara moral atau hukum di beberapa negara.¹²

Pitkin terutama mengaitkannya dengan rezim otoriter dan merendharkannya karena dua alasan: dugaan kurangnya aktivitas dalam

¹¹ Definisi Pitkin dalam tulisan Emanuela Lombardo. Signifikansi Representasi Simbolik untuk Isu Gender dalam Politik. NORA - Jurnal Penelitian Feminis dan Gender Nordik. Hal. 5.

¹² Ibid.

representasi simbolik dan komponen irasionalnya. Sejalan dengan perdebatan ilmiah lainnya dalam representasi politik seperti Saward Representasi simbolik mengkodifikasi hubungan kekuasaan yang ada yang memungkinkan dan membatasi 'berdiri untuk' dan 'bertindak untuk' konstituensi dan apa yang diwakilinya, yaitu identitas sosialnya.

Konstruksi ini membuat presentasi tertentu dari konstituen melalui selektivitas simbol. Ada dua alasan mengapa simbol harus selektif. Pertama, sulit untuk mencapai kelengkapan, untuk menangkap konstituen dalam semua aspeknya, dalam satu simbol tunggal. Konsekuensinya, setiap simbol individu hanya dapat menghadirkan segi tertentu dari sebuah konstituensi. Kedua, presentasi tertentu dari konstituen melalui simbol umumnya dimaksudkan untuk, terutama ketika ditargetkan untuk 'audiens' tertentu Ini menyiratkan bahwa aspek-aspek tertentu diletakkan di tengah panggung dan yang lainnya ditinggalkan. Proses pengabaian ini memperlihatkan ketegangan yang ditimbulkan oleh representasi simbolik yang menetapkan batas-batas konstituen.¹³

Mereka memungkinkan melihat representasi politik dari sudut yang berbeda, yang masing-masing menawarkan wawasan khusus tentang proses politik ini. Kedua, melihat representasi simbolik memungkinkan untuk memahami dinamika kekuasaan apa yang dimainkan dalam proses representasi politik, memungkinkan dan membatasi posisi dan tindakan perwakilan. perwujudan bangsa". Makna sebuah bendera dibangun

¹³ Ibid hal 6

sepanjang tahun dalam praktik sosial yang berbeda sehingga menjadi melekat pada bangsa tertentu. Di atas segalanya, bendera membangun makna bangsa dengan cara tertentu, dengan menghadirkan bangsa dengan cara tertentu, misalnya bersatu, beragam, atau maju. Oleh karena itu, representasi simbolik adalah penyajian suatu konstituen dengan cara tertentu, yang mengungkapkan makna, norma, dan nilai tertentu. Ini bukan sekadar representasi.¹⁴

Teori representasi politik Saward sebagai pembuatan klaim sangat relevan untuk konseptualisasi representasi simbolik karena artikulasinya tentang a) pembuat representasi, dan b) ide referensi atau konstituen. Menurut Saward, seorang pembuat representasi mengedepankan sebuah simbol, yang mewakili sebuah gagasan yang terkait dengan sebuah konstituen dan ditawarkan kepada khalayak.

Identifikasi “pembuat” relevan untuk mengonsepan representasi simbolik lebih lanjut karena representasi simbolik selalu melibatkan aktor yang mengkonstruksi simbol, karena simbol tidak akan menciptakan dirinya sendiri. Makna yang dikonstruksikan melalui simbol-simbol, kemudian, berbeda menurut pembuat yang berbeda. Pembuat dapat membangun simbol dengan cara yang lebih tradisional atau progresif, lebih eksklusif atau inklusif, Sementara pembuat Saward ada di luar politik elektoral, yaitu masyarakat sipil, kelompok lobi atau media terlibat dalam pembuatan klaim, kami terutama tertarik pada representasi politik.

¹⁴ Ibid hal 7

Pembedaan Saward antara konstituensi dan gagasan tentang konstituensi juga relevan karena menunjukkan bahwa yang terwakili dalam sebuah simbol bukanlah konstituensi itu sendiri, tetapi gagasan perwakilan tentang konstituensi. Pembedaan antara konstituensi dan gagasan tentangnya menangkap fakta bahwa sebuah simbol, seperti bendera, memberikan konstituensi seperti bangsa, dengan makna. Sebuah bendera menampilkan bangsa melalui fitur atau gagasan tertentu tentang bangsa.¹⁵

2.2 Konsep *Proxy* Politik

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi konsep *proxy* politik dengan melihat dari perspektif teori simbol representasi. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana Taufan Pawe menggunakan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai simbol dari representasi kekuasaannya dalam pemilihan ketua DPDD II Partai Golkar kota Parepare. Dalam pandangan konsep *proxy* Erna Rasyid Taufan Pawe berposisi sebagai perwakilan kekuatan Taufan Pawe dalam mempertahankan kekuasaannya di internal Partai Golkar kota Parepare. Dengan cara mendukung dan mengusahakan keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare agar pengaruh dari Taufan Pawe di Internal Partai Golkar kota Parepare tetap terus ada. Walaupun secara struktur Taufan Pawe tidak menjadi ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare lagi.

¹⁵ Ibid

Penelitian *Proxy* politik masih sangat kurang khususnya di Indonesia. Sebab *Proxy* politik banyak di artikan sebagai politik kekerabatan ataupun dinasti politik. Yang sebenarnya ketiga ini berbeda. Kata *proxy* banyak digunakan dalam membahas perang khususnya perang-perang atau pertikaian non-senjata api antara Amerika Serikat dan Soviet dalam memperluas pengaruhnya di dunia. Dalam hal ini banyak digunakan dalam perang-perang tanah arab yang banyak di sponsori oleh negara besar lain sebut saja AS dan Soviet atau Rusia.

Perang *proxy* adalah perang yang terjadi antara kedua negara yang mana aktor negara atau pihak eksternal non-negara turut terlibat dalam dinamika konflik yang ada. Perang tersebut bertujuan untuk menyalurkan persenjataan, pelatihan dan pendanaan demi kepentingan pribadi maupun aliansi. Singkatnya, perang proksi adalah pengganti logis untuk negara yang berusaha melanjutkan tujuan strategis mereka sendiri. Pada saat yang sama mereka juga menghindari terlibat langsung dalam perang yang mahal dan penuh darah. Dalam perang proksi, konsep perang yang dilakukan kedua pihak ialah dengan menggunakan aktor luar negara (*actor non state*). Konsep seperti ini membuat posisi siapa kawan dan lawan menjadi sulit untuk dikenali secara jelas.

Konsep *proxy* dalam tulisan ini menyangkut proses politik yang terjadi dalam internal Partai Politik. Berangkat dari pengertian *proxy* yang telah dijelaskan diatas. Konsep *proxy* politik dalam tulisan ini dapat bermakna usaha seseorang dalam merebut, membuat atau

mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan orang lain sebagai perwakilan dirinya dalam memrepresentasikan kekuasaan dirinya. Dengan menggunakan perwakilan sebagai representasi kekuasaannya. Aktor berusaha menunjukkan kekuasaannya melalui perwakilannya. Dengan cara menempatkan perwakilannya dalam posisi yang strategis. Dengan begitu, kekuasaannya yang sebelumnya di ambil alih tetap bisa dikuasai walaupun melalui perwakilan atau perpanjangan tangan aktor tersebut.

Dalam konsep *proxy* politik, terdapat istilah Operation Inherent Resolve yang menggambarkan bahwa selama satu aktor berusaha untuk bekerja melalui aktor lain, masalah agensi dan risiko akan selalu ada. *proxy* politik memiliki dua model, yaitu:

- a. Model Eksploitatif Kekuatan proksi yang sepenuhnya tergantung pada prinsipnya untuk bertahan hidup mencirikan model eksploitatif. Hubungan itu hampir bisa dipandang sebagai satu, antara parasit dan inang. Inang menyediakan sumber kehidupan bagi parasit proksi untuk bertahan hidup. Ketergantungan ini menciptakan ikatan yang kuat antara proksi dan partner, kemudian menghasilkan partner yang hampir memiliki kekuatan dan pengaruh tak terbatas atas proksi.
- b. Model Transaksional Model ini dilakukan dengan melihat permintaan dukungan pemerintah terhadap kekuatan proksi negara lain untuk mengalahkan musuh yang mengancam.

Dengan demikian, kekuatan proksi pemerintah menempatkan parameter pada mitra untuk memasukkan hal-hal seperti peta kekuatan, misi yang jelas, dan garis waktu yang tepat. Pada intinya model transaksional ini mengemukakan bahwa pertukaran layanan dan barang yang menguntungkan semua pihak adalah jantung dari model transaksional.

Seiring perkembangannya konsep *proxy* politik ini juga sering di gunakan dalam perebutan kekuasaan di suatu Lembaga politik, dimana para aktor yang mempunyai kepentingan untuk menguasai suatu Lembaga politik tidak lagi terjun langsung kelapangan untuk bertarung, tetapi para aktor ini lebih memposisikan dirinya di balik layar sebagai pemasok modal bagi *proxy* yang digunakan dalam pertarungan perebutan kekuasaan. Aktor yang memiliki kepentingan ini kemudian menggunakan *proxy* atau orang lain untuk menduduki suatu jabatan politik tanpa harus melibatkan dirinya secara langsung. Keuntungan dengan menggunakan konsep *proxy* ini para aktor yang terlibat tidak perlu lagi menjadi sorotan media atau masyarakat namun aktor tersebut tetap mampu memegang kendali pada Lembaga politik melalui *proxy* yang digunakan sebagai pion untuk mengontrol Lembaga tersebut.

Fenomena yang terjadi pada pemilihan ketua DPD partai Golkar pare-pare juga merupakan suatu fenomena yang dapat dianalisis menggunakan konsep *proxy* politik karena, keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe tidak lepas dari kepentingan taufan pawe sebagai ketua

DPP partai Golkar Sulawesi selatan untuk tetap memiliki kendali atas DPD partai Golkar Parepare dengan menggunakan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai *proxy* dalam perebutan kekuasaan di DPD partai Golkar Parepare

2.3 Kerangka Pemikiran

Partai politik yang seharusnya menjadi penggerak demokrasi seringkali tidak menjalankan proses demokrasi didalam internalnya sendiri, seperti dalam regenerasi kepemimpinan. Di dalam proses regenerasi kepemimpinan partai politik seringkali alpa dalam menjalankan proses demokrasi di internalnya sendiri. Sistem kekerabatan telah tumbuh dan berkembang didalam tubuh partai politik hari ini. kekuatan kekerabatan dan hubungan relasi para elit actor menjadi hal yang wajar dalam praktek pemilihan calon ketua partai

Keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare kemudian mengundang banyak tanya karena Erna Rasyid Taufan Pawe hanya menjadi kader biasa didalam organisasi Partai Golkar Kota Parepare dan tidak memiliki rekam jejak atau jabatan politik baik di daerah maupun provinsi. sementara pada pemilihan tersebut terdapat banyak kader yang memiliki pengalaman yang lebih untuk menduduki posisi sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Sementara itu dalam tubuh DPD II Partai Golkar Kota Parepare juga masih terdapat kader yang dianggap lebih layak untuk menduduki posisi tersebut.

Keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe yang sejatinya bergerak pada ruang non formal dan merupakan proses tarikan kepentingan, maka penulis akan menggunakan teori representasi simbolik sebagai pisau analisis untuk mengungkap dinamika politik yang terjadi. Teori representasi simbolik sejatinya menjadi angin baru dalam melihat dinamika politik dalam keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Representasi simbolik memberikan gambaran serta sudut pandang yang lebih luas menyangkut keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai bagian dari *proxy* Taufan Pawe dalam melenggangkan kekuasaan dan pengaruhnya di Internal Partai Golkar kota Parepare. Selain itu penulis juga menggunakan konsep *proxy* untuk mencoba dalam memperkuat analisis dan argumentasi menyangkut keterpilihan Erna Rasyid Taufan Pawe yang dijadikan *proxy* oleh Taufan Pawe dalam proses pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Sekaligus menganalisis lebih jauh kekuatan yang dimiliki oleh seorang Taufan Pawe sebagai seorang aktor politik sentral dalam penggunaan pengaruhnya dalam proses *proxy* politik di dalam dinamika Musyawarah Partai Golkar kota Parepare.

2.4 Skema Pikir

